

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**TAHUN 2021**



**DINAS KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1  
PASURUAN

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat terselesaikannya dengan lancar. Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban kinerja kegiatan maupun kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyusunan laporan dilaksanakan secara berkala meliputi Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan DPPA TA. 2021 Nomor : DPPA/B.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2021. Realisasi program kegiatan dari Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) akan mendukung capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja ini menjadi landasan evaluasi dan pengawasan, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban OPD kepada para pemangku kepentingan.

Tidak dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 belum mencapai hasil maksimal, oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan mampu menggambarkan kinerja, baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, sehingga dengan laporan ini mengharapkan pula adanya masukan demi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Pasuruan, 31 Januari 2022

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Pasuruan

**drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 199102 2 001

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR . . . . .	i
DAFTAR ISI . . . . .	ii
DAFTAR GAMBAR . . . . .	iv
DAFTAR TABEL . . . . .	v
DAFTAR GRAFIK . . . . .	vi
DAFTAR LAMPIRAN . . . . .	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF . . . . .	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN . . . . .</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang . . . . .	1
B. Maksud dan Tujuan . . . . .	2
C. Gambaran Umum . . . . .	3
D. Isu-isu Strategis . . . . .	4
E. Landasan Hukum . . . . .	5
F. Sistematika Penyusunan . . . . .	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA . . . . .</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis . . . . .	8
1. Visi . . . . .	9
2. Misi . . . . .	10
3. Tujuan . . . . .	10
4. Sasaran dan Indikator Kinerja . . . . .	11
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 . . . . .	11

	Halaman
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA . . . . .	13
A. Pengukuran Kinerja . . . . .	13
B. Capaian Kinerja Organisasi . . . . .	14
C. Realisasi Anggaran 2021 . . . . .	26
D. Capaian Nilai Sakip . . . . .	27
BAB IV PENUTUP . . . . .	28
A. Kesimpulan . . . . .	28
B. Kendala yang dihadapi dan RTL . . . . .	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN . . . . .	31

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar : 1.1. Struktur Organisasi . . . . .	4
3.1. Rumus Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) . . . . .	18
3.2. Rumus Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	19
3.3. Rumus Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif . . . . .	21
3.4. Rumus Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) . . . . .	23
3.5. Rumus Nilai SAKIP Perangkat Daerah . . . . .	25

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : 1.1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan . . . . .	3
1.2. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian . . . . .	3
2.1. Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah . . . . .	10
2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan OPD . . . . .	11
2.3. Sasaran dan Indikator Sasaran OPD . . . . .	11
3.1. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja . . . . .	14
3.2. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Th. 2021 . . . . .	15
3.3. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) . . . . .	16
3.4. Data Anggaran Responsif Gender (ARG) . . . . .	18
3.5. Program Pendukung Anggaran Responsif Gender (ARG) . . . . .	18
3.6. Data Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak . . . . .	19
3.7. Program Pendukung Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak . . . . .	20
3.8. Data Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif . . . . .	21
3.9. Program Pendukung PUS yang menjadi Peserta KB Aktif . . . . .	22
3.10. Data Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) . . . . .	23
3.11. Program Pendukung Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) . . . . .	24
3.12. Data Capaian Nilai SAKIP . . . . .	25
3.13. Program Pendukung Capaian Nilai SAKIP . . . . .	25
3.14. Realisasi Anggaran berdasarkan Bidang Urusan . . . . .	26
3.15. Rincian Realisasi Anggaran Program . . . . .	26
4.1. Kedala/Masalah yang dihadapi dan RTL . . . . .	29

**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
Grafik : 3.1. Grafik Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) . . . . .	16
3.2. Grafik Capaian Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) . .	18
3.3. Grafik Capaian Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak . . . . .	20
3.4. Grafik Capaian Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif . . . . .	22
3.5. Grafik Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) . . . . .	24
3.6. Grafik Capaian Nilai SAKIP . . . . .	25

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 . . . . .	32
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2021 . . . . .	34
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2021 . . . . .	46
4. Rencana Strategis Tahun 2021 . . . . .	48
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 . . . . .	51
6. Prestasi/Penghargaan Tahun 2021 . . . . .	53

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### A. Mekanisme Penyusunan

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sistematika penyajian Laporan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### B. Mekanisme Pengukuran

Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan tahun 2021 menetapkan 1 (satu) Tujuan yaitu “**Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat**“ dengan Indikator **Indek Pembangunan Gender (IPG)**, dan 4 (empat) Sasaran Strategis dengan mengaplikasikan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, antara lain :

1. Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Indikator Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG);
2. Sasaran Meningkatkan Kesertaan ber-KB dengan Indikator Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak;
3. Sasaran Meningkatkan Kesertaan ber-KB dengan Indikator Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA);
4. Sasaran Meningkatkan Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas dengan Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
5. Sasaran Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

### **C. Ringkasan Kinerja**

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2021 menetapkan 8 (delapan) Program untuk melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya dalam **Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
  - a. Sekretariat :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
    - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
    - Program Perlindungan Perempuan;
    - Program Pemenuhan Hak Anak;
    - Program Perlindungan Khusus Anak.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
  - a. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk :
    - Program Pengendalian Penduduk;
    - Program Pembinaan Keluarga Berencana.
  - b. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan :
    - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera :

Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode selanjutnya;
3. Penyempurnaan Pelaksanaan program kegiatan selanjutnya;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan yang akan dicapai pada sistem dan tata kelola administrasi instansi pemerintah diarahkan pada terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap satuan kerja dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta merealisasikan tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah.

Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengedepankan azas berdayaguna, berhasil guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta dengan menerapkan azas kepastian hukum azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas transparansi dan azas akuntabilitas.

Azas kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa setiap penyelenggara negara akan dikenai sanksi (administratif dan atau hukum) apabila terbukti melanggar peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Azas proporsionalitas mengacu pada pengertian rentang tanggung jawab pelaksanaan tugas setiap penyelenggara negara berbanding lurus dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Azas profesionalitas berarti perwujudan pelaksanaan tugas setiap penyelenggara negara berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai latar belakang pendidikannya.

Azas transparansi adalah azas yang mengedepankan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan masukan dan kontrol atas kinerja satuan kerja.

Azas akuntabilitas adalah azas yang mensyaratkan bahwa setiap penyelenggaraan program kegiatan harus dapat dihitung dan diukur secara kualitatif maupun kuantitatif serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah azas-azas tersebut telah dilaksanakan serta sejauh mana tingkat capaian kinerja satuan kerja dalam melaksanakan program kegiatannya adalah dengan memantapkan sistem pelaporan yang baku, menyeluruh, terukur dan memiliki bobot analisis yang tinggi. Sistem dimaksud dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun serta melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan di tahun 2021 ini sesuai dengan tata kerja, tugas pokok fungsinya yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan sampai dengan hasil yang dicapai dan harapannya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) selanjutnya

### C. Gambaran Umum

Sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan memiliki personil sebanyak 177 orang yang terdiri dari PNS Kabupaten sebanyak 23 orang, PTT (kontrak) sebanyak 2 orang dan THL sejumlah 83 orang, sedangkan yang berstatus sebagai PNS Pusat terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 69 orang. Adapun rincian personil berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongan Kepangkatan :

*Tabel 1.1. :  
Pegawai berdasarkan Golongan*

Golongan	IV	III	II	I	JML
Sebanyak (orang)	36	55	1	-	<b>92</b>

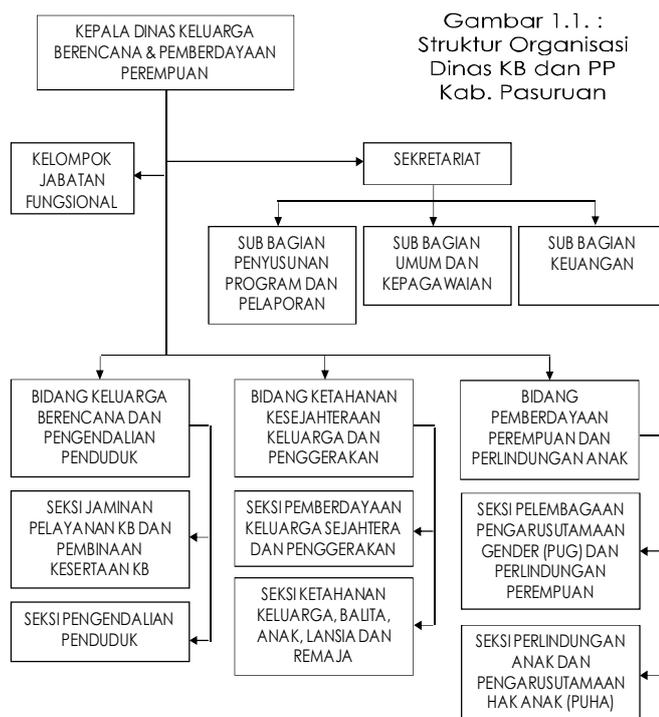
*Sumber Data : Dinas KB dan PP*

2. Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian :

*Tabel 1.2. :  
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian*

TINGKAT PENDIDIKAN	STATUS/BANYAKNYA PEGAWAI						JML
	P N S		CPNS		PTT	THL	
	Tk.II	Tk.I	Tk.II	Tk.I			
Doktor (S3)	-	-	-	-	-	-	-
Pasca Sarjana (S2)	11	5	-	-	-	-	16
Sarjana (S1)	9	38	-	-	-	26	73
D3/D1		3	-	-	-	9	12
SLTA	3	23	-	-	2	41	69
SLTP	-	-	-	-	-	2	2
SD	-	-	-	-	-	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	-	-	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>177</b>

*Sumber Data : Dinas KB dan PP*



Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dimana Dinas Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi. (bagan Struktur organisasi Dinas KB-PP sebagaimana gambar 1.1.)

#### D. Permasalahan Utama Organisasi (Isu Strategis)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Adapun Isu – Isu Strategis yang sudah diidentifikasi oleh Dinas KB dan PP adalah sebagai berikut :

1. Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Masih belum merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB;
2. Belum optimalnya penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

3. Minimnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga;
4. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih belum optimal;
5. Masih rendahnya kondisi kualitas pemberdayaan perempuan jika dibandingkan laki – laki (*Gender Equility*);
6. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7. Perlindungan anak masih belum optimal.

#### **E. Landasan Hukum**

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

#### **F. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan LKjIP Tahun 2021 dilakukan dengan membentuk *Focus Group Discussion* (FGD), yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tahun 2019-2023 menjadi beberapa sasaran lengkap dengan indikator kinerjanya. Kegiatan tahun 2021 yang sudah dilaksanakan oleh Dinas KB dan PP dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai. Adapun sistematika penyusunan LKjIP Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tingkat pencapaiannya, kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan LKjIP Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan LKjIP.
3. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara singkat unsur-unsur Rencana Strategik Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.
4. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020, termasuk menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil serta akuntabilitas keuangan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perencanaan strategik Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategik tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang secara sistematis dan berkelanjutan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang memuat visi, misi tujuan dan kebijakan organisasi dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif.

Dalam perencanaan strategik termuat pula tentang strategik pengembangan sumberdaya manusia/aparatur, jaringan kerja dan lingkungan kerja yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada kondisi, potensi permasalahan, kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat.

Berikut ini Visi, Misi Pemerintah Daerah dan Tujuan, Sasaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

## 1. Visi

Visi merupakan cita-cita atau kondisi masa depan suatu daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan atau isu-isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah (lima tahun), serta harus sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA,  
MASLAHAT DAN BERDAYA SAING“**

Penjabaran dari Visi tersebut adalah :

**SEJAHTERA :**

Sejahtera lebih bersifat ekonomi dan material melalui sektor-sektor produktif dan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

**MASLAHAT :**

Maslahat lebih bersifat sosial dan spiritual, melalui tiga aspek yaitu : (1) Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran; (2) Keamanan dan Ketertiban; dan (3) Lingkungan Hidup yang Lestari. Masyarakat Kabupaten Pasuruan lima tahun kedepan tidak hanya sejahtera secara ekonomi atau material saja tetapi juga ada peningkatan aspek sosial dan spiritualnya secara bersamaan. Orientasi penguatan kedalam (Maslahat dan Sejahtera) tersebut adalah ditopang melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.

**BERDAYA SAING :**

Memiliki keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui : (1) Reformasi Birokrasi berbasis IT; (2) Ekonomi Lokal yang dinamis; dan (3) Infrastruktur yang handal.

## 2. Misi dan Sasaran

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Misi menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai Visi. Rumusan Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi. Rumusan Visi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera dan Berdaya Saing” tersebut, DINAS KB DAN PP melaksanakan Misi ke-5 (lima) dengan Sasaran ke-5 (lima) sebagai Tujuan OPD sebagai berikut :

*Tabel 2.1. :  
Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah*

MISI (ke-5)	SASARAN
Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Permukiman dan Pendidikan dengan mengintegrasikan Pendidikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud Afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesehatan;
	2. Meningkatnya Pelayanan Dasar Pendidikan;
	3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat;
	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman;
	<b>5. Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat;</b>
	6. Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda.

## 3. Tujuan dan Indikator Tujuan OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sesuai dengan Misi ke-5 (lima) dan Sasaran ke-5 (lima) Bupati Pasuruan sebagai tujuan Dinas KB dan PP yaitu :

Tabel 2.2. : Tujuan dan Indikator Tujuan OPD

TUJUAN OPD	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	Indek Pembangunan Gender (IPG)	91,07 %

#### 4. Sasaran OPD dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, dalam rumusan yang spesifik, yang sedapat mungkin terukur secara kuantitatif dalam jangka waktu tahunan. Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Dinas KB dan PP mempunyai sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2.3. : Sasaran dan Indikator

SASARAN OPD	INDIKATOR	TARGET
a. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	1. Persentase Anggaran yang Responsif Gender	18,50 %
	2. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	70,00 %
b. Meningkatnya Kesertaan ber-KB;	3. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	75,00 %
c. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas;	4. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	51,25 %
d. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah.	5. Nilai SAKIP	80,90 %

#### B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasar kebijakan, sasaran dan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan dan merupakan dokumen perencanaan operasional.

Didalam Perjanjian Kinerja berisi target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai serta operasional program kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan sebagai rujukan dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

Perjanjian Kinerja mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai :

- Operasionalisasi Visi dan Misi Dinas KB dan PP dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan kedalam rencana program kegiatan yang bersifat lebih operasional;
- Rincian kegiatan melalui pendanaan/sumber pembiayaan APBD Kabupaten;
- Alat bantu dalam penyusunan LKjIP.

Indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas dijabarkan seperti pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Menjamin konsistensi perencanaan dan penetapan program kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah;
- Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dalam Musrenbang maupun antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Memperkuat landasan penentuan kegiatan tahunan Dinas KB dan PP secara kronologis dan berkelanjutan.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran 1*.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, elastis, nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Nepotisme, Kolusi dan Korupsi.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta urusan pemberdayaan dan perlindungan anak, perlu ditetapkan sasaran dan indikator dengan prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Time-based* (SMART) untuk menetapkan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, serta indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperoleh berdasarkan pada indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2018-2023. Pedoman pengukuran pencapaian kinerja sasaran menggunakan skala ordinal seperti disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.  
Skala Ordinal Pengukuran Kinerja :

JUMLAH NILAI	KATEGORI
85 sampai dengan 100	Sangat berhasil
70 s/d kurang dari 85	Berhasil
55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil
Kurang dari 55	Tidak berhasil

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja sasaran. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan strategik guna meningkatkan kinerja organisasi.

## B. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk capaian kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategi yang ada pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara menghitung capaian melalui formulasi yang telah ditetapkan. Untuk capaian indikator tujuan dan masing-masing indikator sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

## 1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.2. : Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Sat.	Th.2020	Th. 2021				Efisiensi (6-7)
		Realisasi Kinerja	Kinerja			Capaian Anggaran	
			Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b><u>Tujuan :</u></b> Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,48	91,07	90,89	99,81	90,32	9,49
<b><u>Sasaran :</u></b> a. Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	%	18,31	18,50	n/a	n/a	n/a	n/a
b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	%	-	100,00	87,76	87,76	66,90	20,86
c. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	%	74,91	75,00	73,99	98,66	83,81	14,85
d. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Nilai	-	51,25	55,15	107,62	86,72	20,90
e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,79	80,90	80,90	100	92,25	4,75

Sumber Data : Dinas KB dan PP

Penjelasan singkat capaian indikator kinerja tujuan dan masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

**a. Tujuan :**

Merujuk pada UNDP bahwa untuk mengevaluasi sejauh mana gambaran ketidak setaraan gender diperlukan sebuah indikator komposit yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur rata-rata geometric pencapaian dalam kemampuan dasar, sama seperti dalam IPM yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) tetapi dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Sebagai indikator komposit, IPG memberikan gambaran secara agregat, sedangkan implementasi hasil penghitungan IPG dalam program pembangunan membutuhkan kajian lebih jauh pada indikator yang berkait dengan komponen penyusun IPG. Komponen pembentuk IPG yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berdasarkan kelompok gender.

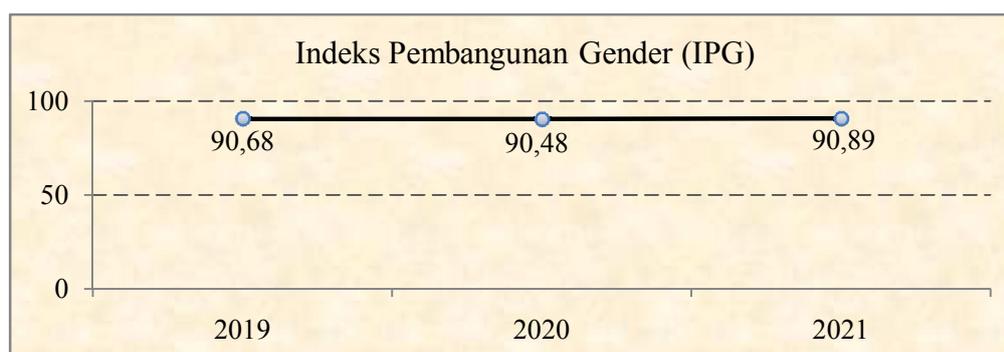
Capaian indikator Tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

*Tabel 3.3. :  
Data Indeks Pembangunan Gender (IPG)*

Indikator Tujuan	Capaian Th. 2020	Th 2021		
		Target	Capaian	%
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,48	91,07	90,89	99,80

*Sumber Data : BPS*

*Tabel 3.1. :  
Grafik Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)*



Berdasarkan capaian indikator tujuan di atas, maka sasaran tujuan yaitu Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) menghasilkan angka capaian 90,89 %, atau naik 0,41 % dari capaian tahun 2020 yaitu 90,48 %, maka persentase capaian tahun 2021 sebesar 99,80 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

**b. Sasaran :**

**1) Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan bagian dari pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*). Harus dipahami bahwa PPRG bukanlah merupakan suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, namun PPRG merupakan alat dan bukan tujuan. Dalam penyusunan PPRG dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Penyusunan PPRG wajib mendasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikenal singkatan 3E, yaitu Ekonomis, Efisien dan Efektif serta menambahkan prinsip Equity (E). Teknis penyusunan PPRG di daerah dapat dilakukan melalui : (1) analisis gender dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP), (2) penyusunan *Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender* (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD). Anggaran Responsif Gender (ARG) terbagi dalam 3 kategori yaitu : (1) anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki, (2) anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender, (3) anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Anggaran yang Responsif Gender tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1. dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Gambar 3.1. : Rumus Persentase ARG

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender}}{\text{Total APBD}} \times 100 \%$$

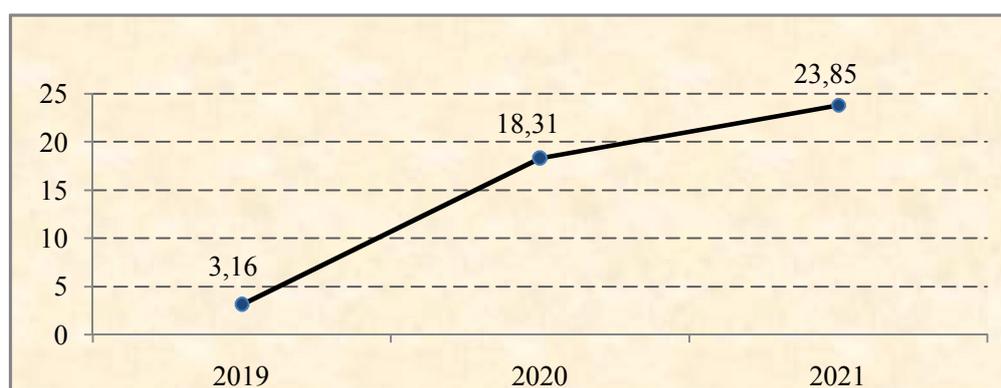
Tabel 3.4. : Data Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Uraian Data	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Jumlah ARG	37.996.522.084,-	277.769.419.428,-	411.892.598.063,-
Total Anggaran	1.201.692.208.820,-	1.516.839.718.422,-	1.726.941.085.588,-
<b>Persentase ARG</b>	<b>3,16 %</b>	<b>18,31 %</b>	<b>23,85 %</b>

Tabel 3.5. : Program Pendukung Persentase Anggaran yang Responsif Gender

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	( % )
1.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	290.480.950,-	262.357.154,-	90,32

Grafik 3.2. : Grafik Capaian Persentase ARG



Berdasarkan tabel dan grafik capaian di atas, maka indikator Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) menghasilkan capaian sebesar 23,85% atau 128,92 % dari target 18,50 % dan termasuk dalam kategori Berhasil.

## 2) Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan perempuan dan anak menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus kekerasan di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO), antara 40 hingga 70 persen perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.6. dan grafik 3.3. dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

*Gambar 3.2. :*  
*Rumus Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak*

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak}}{\text{Jumlah Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak}} \times 100 \%$$

*Tabel 3.6. :*  
*Data Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak*

Uraian Data	Sat.	2019	2020	2021
Jumlah Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Org	46	40	43
Jumlah Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak	Org	55	48	49
Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	%	<b>83,64</b>	<b>83,33</b>	<b>87,76</b>

*Sumber Data : Dinas KB dan PP*

Tabel 3.7. :  
Program Pendukung Indikator Kinerja  
(Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	( % )
1.	Perlindungan Perempuan	207.043.200,-	83.621.600,-	40,39
2.	Pemenuhan Hak Anak	187.770.400,-	182.266.750,-	97,07
3.	Perlindungan Khusus Anak	203.932.000,-	66.606.000,-	32,66
<b>Jumlah</b>		<b>598.745.600,-</b>	<b>332.494.350,-</b>	<b>55,53</b>

Sumber Data : Dinas KB dan PP

Grafik 3.3. :  
Grafik Capaian Persentase Penanganan  
Kekerasan Perempuan dan Anak



Data tersebut menunjukkan capaian sebesar 87,76 %. Capaian tersebut masih belum memenuhi target 2021 yaitu 100 % penanganan kasus dan termasuk dalam kategori **Berhasil**. Belum tercapai target 100 % disebabkan karena masih belum semua korban atau keluarga korban berani melaporkan karena masih dianggap aib, kedepan diharapkan ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan tersebut.

### 3) Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)

Prosentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif menggambarkan jumlah pasangan usia subur yang menjadi Peserta KB aktif melalui metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi dibagi menjadi 2 macam yakni Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, Implan, Metoda Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP) serta Non MKJP dengan Suntik, Kondom dan Pil KB. Melalui kepesertaan ber-KB diharapkan keluarga dapat mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak sehingga tercipta keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas. Pertimbangan diterapkannya indikator ini adalah dengan semakin banyaknya akseptor KB mengindikasikan masyarakat telah peduli dan sadar untuk membentuk keluarga kecil yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Program Keluarga Berencana diarahkan pada Pasangan Usia Subur (PUS). Berikut ini hasil data Realisasi indikator kinerja persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif (PA) pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel, grafik dan rumus perhitungan sbb :

*Gambar 3.3. :  
Rumus Persentase Pasangan Usia Subur (PUS)  
yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)*

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100 \%$$

*Tabel 3.8. :  
Data Persentase Pasangan Usia Subur (PUS)  
yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)*

Uraian Data	Sat.	2019	2020	2021
Jumlah Peserta KB Aktif (PA)	Org	273.503	269.473	247.545
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Org	363.982	359.716	334.553
Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif	%	<b>74,14</b>	<b>74,91</b>	<b>73,99</b>

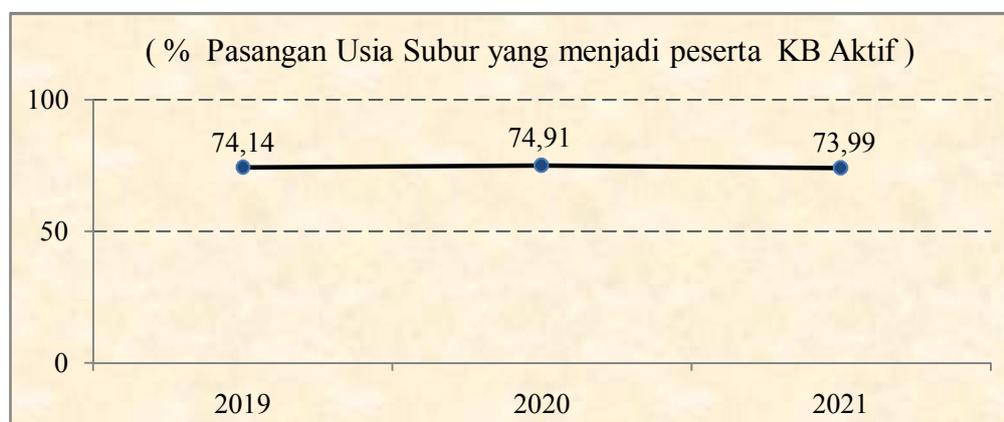
*Sumber Data : Dinas KB dan PP*

Tabel 3.9. :  
Program Pendukung Indikator Kinerja  
(Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	( % )
1.	Pengendalian Penduduk	5.049.800,-	4.454.200,-	88,21
2.	Pembinaan Keluarga Berencana	8.520.730.410,-	7.141.280.786,-	83,81
<b>Jumlah</b>		<b>8.525.780.210,-</b>	<b>7.145.734.986,-</b>	<b>83,81</b>

Sumber Data : Dinas KB dan PP

Grafik 3.4. :  
Grafik Capaian Persentase Pasangan Usia Subur (PUS)  
yang menjadi peserta KB Aktif (PA)



Dilihat dari tabel dan grafik diatas pada tahun 2021 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sejumlah 247.545 orang/akseptor atau 73,99 % dari Jumlah pasangan usia subur sebanyak 334.553 orang. Capaian tahun ini turun dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75 %. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 21.928 akseptor atau sebesar 8,14 % dan termasuk dalam kategori **Cukup Berhasil**. Capaian ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi covid-19 yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun terakhir, akibatnya antusiasme masyarakat untuk pergi ke Faskes pelayanan KB menurun.

#### 4) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan.

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia.

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1. dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Gambar 3.4. :  
Rumus Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

$$\frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$$

Tabel 3.10. :  
Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

Uraian Data	Sat.	2020 (awal)	2021		
			Target	Capaian	%
1 Indeks Ketentraman	Skor	-	51,90	55,89	107,69
2 Indeks Kemandirian	Skor	-	50,00	53,79	107,58
3 Indeks Kebahagiaan	Skor	-	51,85	55,78	107,58
<b>I P K (No.1+2+3/3)</b>	<b>Nilai</b>	<b>-</b>	<b>51,25</b>	<b>55,15</b>	<b>107,62</b>

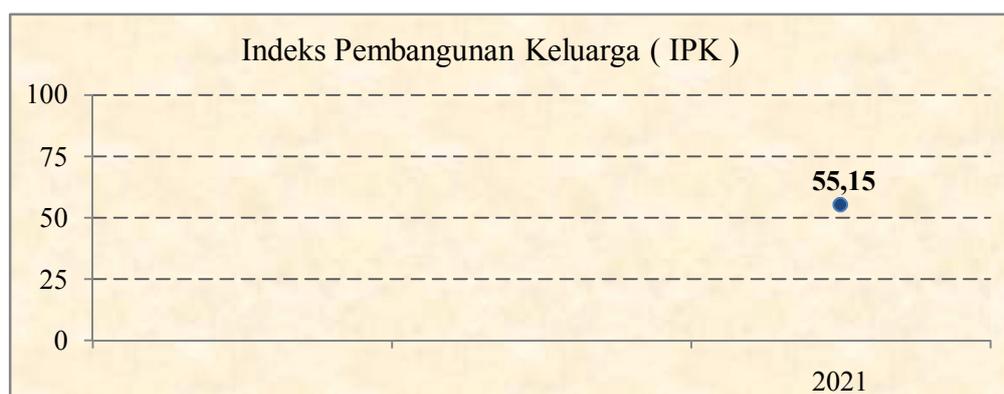
Sumber Data : iBANGGA

Tabel 3.11. : Program Pendukung Indikator Kinerja  
Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	( % )
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.054.996.100,-	914.923.800,-	86,72

Sumber Data : Dinas KB dan PP

Grafik 3.5. : Grafik Capaian IPK



Penilaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) berkisar antara 0-100 dengan kategori 1). **Kurang Baik** (Rentan) apabila nilainya di bawah 40; 2). **Cukup Baik** (Berkembang) apabila nilainya antara 40-70; dan 3). **Baik** (Tangguh) apabila nilainya di atas 70. IPK merupakan indikator awal di tahun ini, sehingga belum ada data capaian pembandingan dari tahun sebelumnya oleh keran itu dapat kami sampaikan bahwa capaian tahun 2021 mendapat Nilai sebesar 55,15 % yang telah melampaui 3,90 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 51,25 % dan termasuk dalam kategori **Cukup** (Berkembang).

##### 5) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi tim SAKIP Kabupaten Pasuruan, bahwa untuk meningkatkan penilaian SAKIP serta mendukung tujuan dan sasaran Bupati Pasuruan untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif, maka Dinas KB dan PP menetapkan sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP.

Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel, dan rumus perhitungan sebagai berikut :

Gambar 3.5. : Rumus Nilai SAKIP PD

<b>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP PD</b>
--

Tabel 3.12. : Capaian Nilai SAKIP PD

Uraian Data	Sat.	2020 (awal)	2021		
			Target	Capaian	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,80	80,90	80,90	100

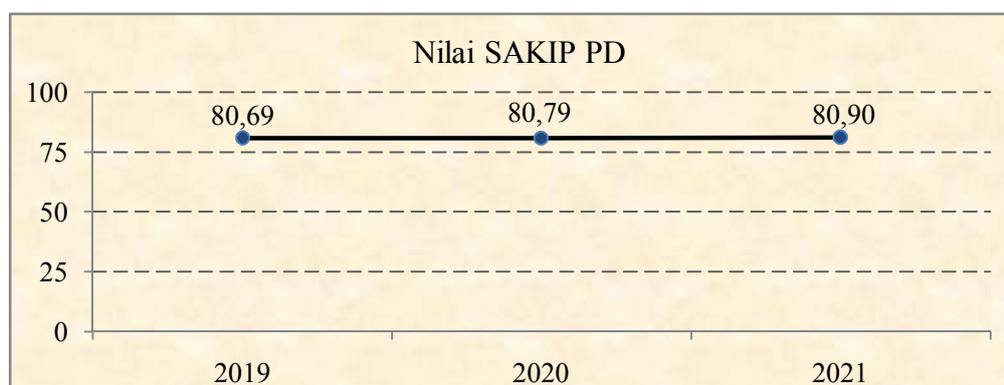
Sumber Data : Dinas KB dan PP

Tabel 3.13. : Program Pendukung Indikator Kinerja Nilai SAKIP

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	( % )
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.446.095.065,-	5.187.311.713,-	95,25

Sumber Data : Dinas KB dan PP

Grafik 3.6. :  
Grafik Capaian Nilai SAKIP PD



Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menghasilkan capaian sebesar 80,90 % atau 100 % dan termasuk dalam kategori **Baik**.

## C. Realisasi Anggaran 2021

Tabel 3.14. :  
Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib  
yang tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/Bidang	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	( % )
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.335.321.615,-	5.782.163.217,-	91,27
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.580.776.310,-	8.060.658.786,-	84,13
<b>TOTAL</b>		<b>15.916.097.925,-</b>	<b>13.842.822.003,-</b>	<b>86,97</b>

Tabel 3.15. :  
Rincian Realisasi Anggaran Program

No	Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	( % )
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :			
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.446.095.065,-	5.187.311.713,-	95,25
2.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	290.480.950,-	262.357.154,-	90,32
3.	Perlindungan Perempuan	207.043.200,-	83.621.600,-	40,39
4.	Pemenuhan Hak Anak	187.770.400,-	182.266.750,-	97,07
5.	Perlindungan Khusus Anak	203.932.000,-	66.606.000,-	32,66
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :			
6.	Pengendalian Penduduk	5.049.800,-	4.454.200,-	88,21
7.	Pembinaan Keluarga Berencana	8.520.730.410,-	7.141.280.786,-	83,81
8.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.054.996.100,-	914.923.800,-	86,72
<b>TOTAL</b>		<b>15.916.097.925,-</b>	<b>13.842.822.003,-</b>	<b>86,97</b>

Sumber Data : Dinas KB dan PP

Berdasarkan hasil tabulasi dan rekapitulasi realisasi anggaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2021 didapatkan hasil bahwa realisasi anggaran sebesar 86,97 % (Rp. 13.842.822.003,-) dengan sisa anggaran sebesar 13,03 % (Rp. 2.073.275.922,-). Disamping itu secara umum capaian dari masing-masing program rata-rata sudah diatas 86,97 %, berdasarkan tabel diatas, dari 8 program terdapat 2 program yang capaiannya dibawah 50 % yaitu Program Perlindungan Perempuan yang terserap hanya sebesar Rp. 83.621.600,- (40,39%) dan Program Perlindungan Khusus Anak yang terserap hanya sebesar Rp. 66.606.000,- (32,66%). Hal itu dikarenakan selama tahun 2021 tidak ada anak dengan kebutuhan khusus yang menjadi korban kekerasan.

#### **D. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (Sangat Memuaskan), dengan skor >90 – 100, sedangkan A (Memuaskan) skornya >80 – 90, BB (Sangat Baik) dengan skor >70 – 80, B (Baik) dengan skor >60 – 70, CC (Cukup atau memadai) dengan skor >50 – 60, C (Kurang) dengan skor >30 – 50, dan nilai D (Sangat Kurang) dengan skor 0 – 30.

Berdasarkan uraian capaian kinerja diatas, dalam evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan mendapatkan nilai 80,90 % dan termasuk dalam kategori A (Memuaskan).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pencapaian target sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 melalui kegiatan operasional dengan serangkaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dijalankan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan, diperoleh hasil sebagai berikut :

##### **1. Tujuan**

Sasaran tujuan yaitu Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2021 mencapai 90,89 % atau 99,80 % dari target 91,07 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

##### **2. Sasaran :**

- a. Sasaran strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ” Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, dengan indikator sasaran :
  - 1) Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada tahun 2021 menghasilkan angka capaian sebesar 23,85 % atau sebesar 128,92 % dari target 18,50 % dan termasuk dalam kategori **Berhasil**.
  - 2) Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak menghasilkan angka capaian sebesar 87,76 % dengan kasus yang tertangani sebanyak 43 kasus dari 49 kasus yang dilaporkan selama periode tahun 2021. Capaian tersebut meskipun belum mencapai target 2021 yaitu 100 % namun demikian masih masuk dalam kategori **Berhasil**.

- b. Sasaran strategis Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk “Meningkatnya Kesertaan ber-KB” dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif (PA) menghasilkan angka capaian 73,99 % atau sebesar 98,66 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 75 %, dan termasuk dalam kategori **Berhasil**.
- c. Sasaran strategis Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan “Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas” dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) menghasilkan capaian sebesar 55,15 % atau 107,62 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 51,25 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.
- d. Sasaran strategis Sekretariat “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah menghasilkan angka capaian 80,90 % atau 100 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 80,90 %, dan termasuk dalam kategori **Berhasil**.

## B. Permasalahan Yang Dihadapi dan Rencana Tindak Lanjut

Tabel 4.1. :  
Kendala yang dihadapi dan Rencana Tindak Lanjut

Kendala/Masalah	Rencana Tindak Lanjut
<p><b><i>Bidang PP dan PA :</i></b></p> <p>1. Belum semua OPD dan Kecamatan mengumpulkan Dokumen PPRG tepat waktu terkait Capaian Anggaran Responsif Gender</p>	<p>a. Berkirim surat ke semua OPD dan Kecamatan untuk meminta Dokumen PPRG;</p> <p>b. Melaksanakan Rakor Pokja PUG dan <i>Focal Poini</i>;</p> <p>c. Meningkatkan komitmen antar OPD dan Kecamatan.</p>

Kendala/Masalah	Rencana Tindak Lanjut
<p><b>Bidang KB dan Dalduk :</b></p> <p>1. Pada kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelayanan KB di Daerah masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19.</p>	<p>a. Perbanyak capaian vaksinasi covid-19 hingga terbentuk Herd Immunity;</p> <p>b. Memberikan KIE kepada seluruh akseptor untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga mau datang ke fasilitas kesehatan;</p> <p>c. Apabila tidak berkenan untuk datang ke faskes dalam rangka pemasangan alat kontrasepsi maka dianjurkan untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi yang dijual bebas (Kondom,PIL).</p>
<p>2. Pelaksanaan MOW dan MOP masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.</p>	<p>a. Perlu memberikan KIE kepada calon akseptor tentang pentingnya berKB;</p> <p>b. Melakukan pendampingan secara berkala terhadap calon akseptor;</p> <p>c. Diperlukan pemeriksaan tambahan berupa tes antigen ,foto torax dan Pemeriksaan Darah Lengkap.</p>
<p><b>Bidang K3P :</b></p> <p>3. Program dan kegiatan tahun 2021 tidak berjalan sesuai dengan rencana karena pandemi covid-19, sehingga kegiatan dilaksanakan di triwulan terakhir</p>	<p>a. Kegiatan yang belum tercover di tahun 2021 akan di tindak lanjuti di tahun 2022 sehingga pemberian sosialisasi tentang stunting akan lebih merata.</p>

Pasuruan, 31 Januari 2022  
 Kepala DP3AP2KB  
 Kabupaten Pasuruan



**drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630626 199102 2 001

## LAMPIRAN – LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG

Jabatan : KEPALA DINAS KB DAN PP

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. M. IRSYAD YUSUF, S.E, MMA.

Jabatan : BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.**

Pasuruan, 2 November 2021

PIHAK PERTAMA

**Drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 199102 2 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	%	18,50
		Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100
2.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif	%	75
3.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	Nilai	51,25
4.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,90

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	290.480.950,-	APBD
2.	Perlindungan Perempuan	207.043.200,-	APBD, APBN
3.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	187.770.400,-	APBD
4.	Perlindungan Khusus Anak	203.932.000,-	APBD, APBN
5.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.520.730.410,-	APBD, APBN
6.	Pengendalian Penduduk	5.049.800,-	APBD
7.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.054.996.100,-	APBD, APBN
8.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.446.095.065,-	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>15.916.097.925,-</b>	

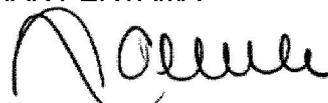
PIHAK KEDUA



**H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.**

Pasuruan, 2 November 2021

PIHAK PERTAMA



**Drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 199102 2 001

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
( P K K )**

**OPD : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan**

**Tahun : 2021**

Bidang Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub-Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Efisiensi ( 6 – 9 )
		Satuan	Target	Realisasi	( % )	Pagu ( Rp )	Realisasi ( Rp )	( % )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :</b>									
<b>Program :</b> A PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	<b>Outcome :</b> Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	96,67	96,47	5.446.095.065,-	5.187.311.713,-	95,25	1,42
<b>Kegiatan :</b> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Output :</b> Jumlah Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dok.	3	3	100	9.999.800,-	9.999.800,-	100	-
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Input :</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok.	3	3	100	9.999.800,-	9.999.800,-	100	-
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Lap.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan :</b> 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Output :</b> Persentase Administrasi Keuangan P D yang Dilaksanakan	%	100	100	100	4.868.510.867,-	4.643.567.278,-	95,38	4,62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Sub-Kegiatan :</b>	<b>Input :</b>								
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100	3.304.630.867,-	3.090.587.278,-	93,52	6,48
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan Melalui Perjanjian/ Perikatan	Bulan	12	12	100	1.563.880.000,-	1.552.980.000,-	99,30	0,70
<b>Kegiatan :</b>	<b>Output :</b>								
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Kompeten dan Disiplin	%	100	100	100	4.999.600,-	4.900.000,-	98,01	1,99
<b>Sub-Kegiatan :</b>	<b>Input :</b>								
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	100	4.999.600,-	4.900.000,-	98,01	1,99
<b>Kegiatan :</b>	<b>Output :</b>								
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	%	100	100	100	96.658.570,-	94.992.740,-	98,28	1,72
<b>Sub-Kegiatan :</b>	<b>Input :</b>								
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	62	62	100	32.224.870,-	32.094.090,-	99,59	0,41
b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis-Kali	11	11	100	20.013.700,-	18.558.650,-	92,73	7,27
c. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Lap.	62	62	100	44.420.000,-	44.340.000,-	99,82	0,18
<b>Kegiatan :</b>	<b>Output :</b>								
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Unit	3	3	100	120.420.000,-	119.887.000,-	99,56	0,44

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Sub-Kegiatan :</b>	<b>Input :</b>								
a. Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair	Unit	-	-	-	-	-	-	-
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	3	3	100	120.420.000,-	119.887.000,-	99,56	0,44
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan :</b>	<b>Output :</b>								
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	85,42	85,42	162.082.978,-	134.079.835,-	82,72	2,70
<b>Sub-Kegiatan :</b>	<b>Input :</b>								
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telpon, Air Dan Internet Selama 12 Bulan	Rek.	36	29	80,56	88.972.978,-	61.649.835,-	69,29	11,27
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	73.110.000,-	72.430.000,-	99,07	0,93
<b>Kegiatan :</b>	<b>Output :</b>								
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Unit	62	61	98,39	183.423.250,-	179.885.060,-	98,07	0,32
<b>Sub-Kegiatan :</b>	<b>Input :</b>								
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	11	11	100	151.207.990,-	148.555.612,-	98,25	1,75
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit	1	1	100	10.464.000,-	10.109.000,-	96,61	3,39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit	50	49	98	21.751.260,-	21.220.448,-	97,56	0,44
<b>Program :</b> B PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<b>Outcome :</b> Persentase Dokumen PPRG yang Disampaikan	%	100	92,79	92,79	290.480.950,-	262.357.154,-	90,32	2,47
<b>Kegiatan :</b> 1. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Output :</b> Jumlah Kelompok Pelaksana Kegiatan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Klp.	62	56	90,70	210.480.950,-	186.151.054,-	88,44	2,26
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	<b>Input :</b> Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Opd	56	54	96,43	72.500.000,-	68.943.154,-	95,09	1,34
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Rakor PUG	Opd	60	55	91,67	27.499.750,-	25.042.900,-	91,07	0,60
c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Opd	56	47	83,93	110.481.200,-	92.165.000,-	83,42	0,51
<b>Kegiatan :</b> 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Ormas Kewenangan Kab./Kota	<b>Output :</b> Jumlah Kelompok yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	Klp.	18	18	100	80.000.000,-	76.206.100,-	95,26	4,74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<b>Input :</b> Jumlah Kelompok yang Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Klp.	18	18	100	80.000.000,-	76.206.100,-	95,26	4,74
<b>Program :</b> C PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<b>Outcome :</b> Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Terlayani	%	100	67,76	67,76	207.043.200,-	83.621.600,-	40,39	27,37
<b>Kegiatan :</b> 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<b>Output :</b> Jumlah Peserta yang Mengikuti Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Orang	140	133	95	64.307.200,-	61.009.600,-	94,87	0,13
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab./Kota	<b>Input :</b> Jumlah Orang yang Mengikuti Rakor tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	140	133	95	64.307.200,-	61.009.600,-	94,87	0,13
<b>Kegiatan :</b> 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab./ Kota	<b>Output :</b> Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani	Orang	74	12	16,22	142.736.000,-	22.612.000,-	15,84	0,38
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab./Kota	<b>Input :</b> Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang Mengadu dan Terlayani	Orang	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rakor Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Orang	74	12	16,22	142.736.000,-	22.612.000,-	15,84	0,38
<b>Program :</b> D PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<b>Outcome :</b> Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	%	<b>100</b>	<b>98,32</b>	<b>98,32</b>	<b>187.770.400,-</b>	<b>182.266.750,-</b>	<b>97,07</b>	<b>1,25</b>
<b>Kegiatan :</b> 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	<b>Output :</b> Jumlah Anggota Gugus Tugas yang Mengikuti Rakor Pelembagaan PHA	Orang	80	80	100	114.999.900,-	114.999.900,-	100	-
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	<b>Input :</b> Jumlah Anggota Gugus Tugas yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi PHA di Kabupaten	Orang	80	80	100	114.999.900,-	114.999.900,-	100	-
<b>Kegiatan :</b> 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	<b>Output :</b> Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kec.	24	22	92,73	72.770.500,-	67.266.850,-	92,44	0,29
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tk. Daerah Kab/Kota	<b>Input :</b> Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang	330	306	92,73	72.770.500,-	67.266.850,-	92,44	0,29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Program :</b> E PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<b>Outcome :</b> Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	%	100	41,67	41,67	203.932.000,-	66.606.000,-	32,66	9,01
<b>Kegiatan :</b> 1. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tk. Daerah Kab/Kota	<b>Output :</b> Jumlah Pelaksana Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kec.	24	10	41,67	203.932.000,-	66.606.000,-	32,66	9,01
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tk. Daerah Kab./Kota	<b>Input :</b> Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mengadu dan Terlayani	Orang	50	19	38	193.932.000,-	66.606.000,-	34,35	3,65
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab./Kota	Jumlah Anggota Tim PPT-PPA Kabupaten dan Pokja Kecamatan melaksanakan Rakor Pendampingan Anak	Orang	-	-	-	10.000.000,-	-	-	-
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA :</b>									
<b>Program :</b> F PENGENDALIAN PENDUDUK	<b>Outcome :</b> Persentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB Baru	%	100	91,67	91,67	5.049.800,-	4.454.200,-	88,21	3,46
<b>Kegiatan :</b> 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<b>Output :</b> Jumlah Kecamatan yg Mengikuti Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kec.	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	<b>Input :</b> Jumlah Masyarakat/Kader IMP yang mendapat Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Kependudukan	Orang	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan :</b> 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah kab./kota	<b>Output :</b> Jumlah Kecamatan yg mengikuti kegiatan Pemetaan Perkiraan Dalduk Cakupan Daerah	Kec.	24	22	91,67	5.049.800,-	4.454.200,-	88,21	3,46
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Perumusan Parameter Kependudukan	<b>Input :</b> Jumlah Tim Koalisi Kependudukan Tk. Kabupaten yang Menyusun Parameter Kependudukan	Tim	-	-	-	-	-	-	-
b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Dalap dan Pelkon yang Tervalidasi	Lap.	24	22	91,67	5.049.800,-	4.454.200,-	88,21	3,46
<b>Program :</b> G PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	<b>Outcome :</b> Persentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB Baru	%	100	90,14	90,14	8.520.730.410,-	7.141.280.786,-	83,81	6,33
<b>Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Dalduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<b>Output :</b> Jumlah Kecamatan yang diberikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Kec.	24	24	100	1.788.444.780,-	1.445.355.237,-	80,82	19,18
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prog.KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	<b>Input :</b> Jumlah Masyarakat/Calon Akseptor yang diberikan KIE Program KKBPK	Orang	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
b. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Kebutuhan Sarana KIE Program KKBPK	Paket	22	14	63,64	246.714.000,-	147.709.899,-	59,87	3,77
c. Pengelolaan Operasional dan Sarana Kampung KB Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Operasional dan Sarana Balai KB	Bulan	12	12	100	1.541.730.780,-	1.297.645.338,-	84,17	15,83
<b>Kegiatan :</b> 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<b>Output :</b> Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kec.	24	23	96,37	2.549.636.350,-	2.456.345.000,-	96,34	0,03
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	<b>Input :</b> Jumlah Kebutuhan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jenis	-	-	-	-	-	-	-
b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang Mendukung Pelaksanaan Program KB	Orang	2753	2653	96,37	2.549.636.350,-	2.456.345.000,-	96,34	0,03
<b>Kegiatan :</b> 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<b>Output :</b> Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksana Layanan KB	Kec.	24	20	83,33	2.966.049.280,-	2.268.800.549,-	76,49	6,84
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<b>Input :</b> Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Faskes	49	20	40,82	115.561.750,-	46.130.000,-	39,92	0,90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
b. Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Masyarakat/Calon Akseptor yang mengikuti Sosialisasi Penggunaan KB MKJP	Orang	10355	7089	68,46	1.975.581.410,-	1.352.410.000,-	68,46	-
c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	22	22	100	874.906.120,-	870.260.549,-	99,47	0,53
d. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mengikuti Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Faskes	-	-	-	-	-	-	-
e. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Akseptor/Peserta KB yang Terlayani	Orang	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan :</b> 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Ormas Tingkat Daerah Kab./ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	<b>Output :</b> Jumlah Pelaksana Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan KB	Kec.	24	19	80,85	1.216.600.000,-	970.780.000,-	79,79	1,05
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	<b>Input :</b> Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Program Bangsa Kencana	Kec.	24	19	80,85	1.216.600.000,-	970.780.000,-	79,79	1,05
<b>Program :</b> H PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	<b>Outcome :</b> Persentase Dimensi Ketentraman;	%	51,90	55,89	107,69	209.296.000,-	208.896.600,-	99,81	7,88
	Persentase Dimensi Kemandirian;	%	50,00	53,79	107,58	497.400.000,-	358.243.000,-	72,02	35,56
	Persentase Dimensi Kebahagiaan.	%	51,85	55,78	107,58	348.300.100,-	347.784.200,-	99,85	7,73

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<b>Output :</b> Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	30	28	93,33	706.696.000,-	567.139.600,-	80,25	13,08
<b>Sub-Kegiatan :</b> a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<b>Input :</b> Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Unit	20	20	100	209.296.000,-	208.896.600,-	99,81	0,19
b. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Tribina dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Poktan	10	8	80	497.400.000,-	358.243.000,-	72,02	7,98
c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kegiatan :</b> 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas Tk. Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<b>Output :</b> Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Kec.	24	24	100	348.300.100,-	347.784.200,-	99,85	0,15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Sub-Kegiatan :</b>	<b>Input :</b>								
a. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi Masyarakat yg Melakukan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Tribina,PIK-R dan UPPKS)	Kec.	24	24	100	341.300.200,-	341.287.800,-	100	-
b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	120	115	95,83	6.999.900,-	6.496.400,-	92,81	3,03
<b>TOTAL</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>88,80</b>	<b>88,80</b>	<b>15.916.097.925,-</b>	<b>13.842.822.003,-</b>	<b>86,97</b>	<b>1,83</b>

Pasuruan, 31 Januari 2022

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Pasuruan

  
**dr. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630626 199102 2 001

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
( P P S )**

**OPD : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan**

**TAHUN : 2021**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja s/d Triwulan Ke-											
				I			II			III			IV		
				Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)
<b>A.</b>	<b>Tujuan :</b>														
1.	Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,95	90,59	<b>99,60</b>	90,99	90,69	<b>99,67</b>	91,03	90,79	<b>99,74</b>	91,07	90,89	<b>99,80</b>
<b>B.</b>	<b>Sasaran :</b>														
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	%	18,36	19,84	<b>108,04</b>	18,41	21,26	<b>115,49</b>	18,45	22,60	<b>122,48</b>	18,50	23,85	<b>128,92</b>
		Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	%	70,00	64,71	<b>92,44</b>	80,00	72,41	<b>90,52</b>	90,00	80,00	<b>88,89</b>	100	87,76	<b>87,76</b>
2.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	%	74,25	74,70	<b>100,60</b>	74,50	74,47	<b>99,96</b>	74,75	74,24	<b>99,31</b>	75,00	73,99	<b>98,66</b>
3.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Nilai	49,75	52,22	<b>104,97</b>	50,25	53,20	<b>105,88</b>	50,75	54,18	<b>106,75</b>	51,25	55,15	<b>107,62</b>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja s/d Triwulan Ke-											
				I			II			III			IV		
				Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)
4.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,83	80,80	<b>99,96</b>	80,86	80,84	<b>90,98</b>	80,89	80,88	<b>99,99</b>	80,90	80,90	<b>100</b>

Pasuruan, 31 Januari 2022

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Pasuruan**drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 199102 2 001

## RENCANA STRATEGIS

OPD : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan

TAHUN : 2021

Misi	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran				
		Uraian	Indikator	Kabijakan	Program	Kegiatan Pokok		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Permukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan- pendidikan Formal dan Non Formal sebagai Wujud Afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	1. Peningkatkan Penyusunan Dokumen PPRG PD	1. Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		
			2. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	1. Optimalisasi Tim Pendamping Kekerasan Tingkat Desa/ Kelurahan dan Forum Anak		1. Perlindungan Perempuan	2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2. Penguatan Korban Kekerasan secara Fisik, Psikologis dan Ekonomi	2. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pencegahan Kekekrasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab./Kota
								2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekekrasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
								1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
							3. Perlindungan Khusus Anak	2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
						1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tk. Daerah Kabupaten/Kota		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Meningkatnya Kesertaan ber-KB	3. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	1. Peningkatan Cakupan Akseptor MKJP 2. Pemerataan Kelengkapan Dukungan Pelayanan dan penyuluhan KB di Kampung KB	1. Pengendalian Penduduk 2. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	4. Indek Pembangunan Keluarga (IPK)	1. Pembangunan dan Ketahanan Keluarga	1. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Optimalisasi Kampung KB dan Komunitas GenRe		2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		4. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Penunjang	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
						5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pasuruan, 31 Januari 2022

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Pasuruan**dr. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**Pembina Utama Muda  
NIP. 19630626 199102 2 001

Lampiran 5.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T )

Formulir RS

TAHUN : 2022

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Th. 2021	Target Kinerja Th 2022 ( s/d Triwulan )			
					Triw-I	Triw-II	Triw-III	Triw-IV
A.	<b>Tujuan :</b>							
1.	Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	<b>90,89</b>	90,99	91,07	91,14	<b>91,22</b>
B.	<b>Sasaran :</b>							
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	%	<b>23,85</b>	18,53	18,55	18,58	<b>18,60</b>
		Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	%	<b>87,76</b>	70,00	80,00	90,00	<b>100,0</b>
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas melalui Kesertaan ber-KB	Persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	%	<b>73,99</b>	75,05	75,10	75,15	<b>75,20</b>
		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Nilai	<b>55,15</b>	55,17	55,18	55,19	<b>55,20</b>
		Persentase Kampung KB Mandiri	%	<b>12,82</b>	13,46	14,15	14,75	<b>15,38</b>
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	<b>80,90</b>	80,93	80,95	80,98	<b>81,00</b>



Pasuruan, 31 Januari 2022

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Pasuruan

  
drg. **LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630626 199102 2 001

**PENGHARGAAN KABUPATEN PASURUAN  
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
TAHUN 2021**

No.	Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Dokumentasi
1.	Piagam Penghargaan SAKIP Nilai “ A “	Tim SAKIP Kabupaten Pasuruan	
2.	Penghargaan APE (Anugrah Parahita Ekapraya) dengan Klasifikasi “ <b>Utama</b> ”	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3.	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan Klasifikasi “ <b>Pratama</b> ”	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Pasuruan, 31 Januari 2022

Kepala DP3AP2KB  
Kabupaten Pasuruan



**dr. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630626 199102 2 001

Catatan :

